

STRATEGI POLITIK IDA FAUZIYAH DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF (PILEG) 2024 DI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA II

Achmad Fawait¹, Usni²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: usni@umj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Ida Fauziyah dalam memenangkan Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan pemilih luar negeri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan Teori Strategi Politik, Teori Mobilisasi Sumber Daya, dan Teori Representasi Politik Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Ida Fauziyah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktural Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi juga oleh kemampuannya mengintegrasikan modal sosial, modal simbolik, dan jaringan organisasi keagamaan ke dalam strategi elektoral yang adaptif. Strategi tersebut diwujudkan melalui diferensiasi politik berbasis rekam jejak, mobilisasi jaringan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimat NU, optimalisasi komunikasi politik kepada pemilih urban, serta penguatan representasi perempuan sebagai sumber legitimasi politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara mobilisasi politik dan representasi perempuan menghasilkan strategi kemenangan yang efektif di tengah kompetisi elektoral yang tinggi di wilayah perkotaan. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai strategi politik perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.

Kata Kunci: Strategi Politik, Mobilisasi Politik, Representasi Perempuan, Pemilu Legislatif, Ida Fauziyah.

Abstract

This study aims to analyze the political strategy employed by Ida Fauziyah in winning the 2024 Legislative Election for the House of Representatives (DPR RI) in the Jakarta II Electoral District, which encompasses Central Jakarta, South Jakarta, and overseas voters. The research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. The analysis is grounded in Political Strategy Theory, Resource Mobilization Theory, and the Theory of Women's Political Representation. The findings reveal that Ida Fauziyah's electoral success was not solely determined by the structural support of the National Awakening Party (PKB), but also by her ability to integrate social capital, symbolic capital, and religious organizational networks into an adaptive electoral strategy. This strategy was manifested through political differentiation based on political experience and policy achievements, the mobilization of Nahdlatul Ulama (NU) and Muslimat NU networks, effective political communication targeting urban voters, and the reinforcement of women's political representation as a source of political legitimacy. Furthermore, Ida Fauziyah successfully transformed her political experience as a former Minister of Manpower and a senior legislator into an electoral asset that strengthened voter trust and credibility. The study concludes that the combination of political mobilization, strategic resource management, and substantive

women's representation generated an effective electoral strategy amid intense political competition in an urban constituency. The research contributes to the development of studies on women's political strategies, electoral mobilization, and gender representation within Indonesia's open-list proportional electoral system.

Keywords: *Political Strategy, Electoral Mobilization, Women's Political Representation, Legislative Election, Ida Fauziyah, Urban Politics.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi representatif modern yang berfungsi sebagai mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil politiknya. Dalam negara demokrasi, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai arena kompetisi politik yang mempertemukan berbagai aktor, kepentingan, ideologi, dan strategi untuk memperoleh legitimasi publik (Dahl, 1971). Melalui pemilu, warga negara diberikan kesempatan untuk menentukan representasi politik yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi serta kepentingan mereka dalam proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara sering kali diukur dari bagaimana proses pemilu berlangsung secara kompetitif, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam konteks Indonesia pascareformasi, sistem demokrasi mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan diterapkannya sistem pemilu yang lebih terbuka dan kompetitif. Salah satu perubahan penting adalah penerapan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih secara langsung calon legislatif yang dianggap paling layak. Sistem ini menggeser pola kompetisi politik dari yang sebelumnya berorientasi pada partai politik menuju kompetisi yang semakin berpusat pada kandidat (*candidate-centered politics*) (Carey & Shugart, 1995). Konsekuensinya, kandidat legislatif tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada kekuatan partai, melainkan dituntut untuk membangun basis dukungan personal melalui strategi politik yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik pemilih.

Perubahan sistem elektoral tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya personalisasi politik dalam kontestasi demokrasi Indonesia. Mietzner (2020) menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi pascareformasi menunjukkan kecenderungan menguatnya peran figur individu dibandingkan identitas partai politik. Dalam situasi demikian, keberhasilan seorang kandidat sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya politik, membangun jaringan sosial, menciptakan citra publik yang positif, serta memanfaatkan peluang politik yang tersedia. Strategi politik tidak lagi sekadar menjadi instrumen kampanye, melainkan menjadi proses perencanaan yang sistematis untuk mengonsolidasikan dukungan elektoral di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Di sisi lain, dinamika perilaku pemilih Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemilih Indonesia, terutama di wilayah perkotaan, semakin rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor figur kandidat, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, dan kompetensi personal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik dibandingkan faktor loyalitas ideologis terhadap partai politik (Liddle & Mujani, 2007). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kandidat legislatif harus mampu menawarkan diferensiasi politik yang jelas agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, strategi politik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun hubungan antara kandidat dan pemilih.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut mengubah lanskap politik elektoral Indonesia. Kampanye politik tidak lagi bergantung pada metode konvensional seperti rapat umum dan pertemuan tatap muka, tetapi juga memanfaatkan

media digital sebagai instrumen utama komunikasi politik. Chadwick (2017) menjelaskan bahwa era media digital telah melahirkan sistem komunikasi politik hibrida (hybrid media system) yang memungkinkan kandidat membangun interaksi langsung dengan pemilih melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menciptakan ruang baru bagi kandidat untuk memperluas jangkauan kampanye, membangun citra politik, serta memengaruhi opini publik secara lebih efektif. Bagi wilayah perkotaan seperti Jakarta, penggunaan media digital menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pemenangan elektoral karena tingginya tingkat penetrasi internet dan literasi digital masyarakat.

Dalam perspektif teori strategi politik, keberhasilan kandidat dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola dan memobilisasi berbagai sumber daya politik yang dimiliki. McCarthy & Zald (1977) melalui Resource Mobilization Theory menjelaskan bahwa kemenangan politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas kandidat, tetapi juga oleh efektivitas pengorganisasian sumber daya seperti jaringan organisasi, dukungan relawan, modal sosial, akses media, dan legitimasi politik. Sementara itu, Tarrow (1998) menekankan pentingnya kemampuan aktor politik dalam memanfaatkan struktur peluang politik (*political opportunity structure*) yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Dengan demikian, strategi politik merupakan kombinasi antara pengelolaan sumber daya internal dan pemanfaatan peluang politik eksternal yang dapat dikonversi menjadi dukungan elektoral.

Dalam perkembangan demokrasi Indonesia, isu keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu tema penting dalam kajian politik elektoral. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga menyangkut kualitas representasi yang dihasilkan. Kebijakan afirmasi berupa kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam politik (Budiatri, 2015). Struktur partai politik yang masih didominasi laki-laki, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta budaya patriarki menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kandidat perempuan dalam kompetisi elektoral.

Dalam perspektif representasi politik, Pitkin (1967) membedakan representasi ke dalam empat dimensi, yaitu representasi formal, deskriptif, simbolik, dan substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan kehadiran perempuan dalam lembaga politik, sedangkan representasi substantif merujuk pada kemampuan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dalam konteks politik elektoral, representasi perempuan tidak hanya menjadi identitas sosial yang melekat pada kandidat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi politik yang memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih. Oleh karena itu, strategi politik kandidat perempuan sering kali memadukan aspek mobilisasi elektoral dengan pembangunan representasi simbolik dan substantif.

Salah satu kasus menarik dalam Pemilihan Legislatif 2024 adalah keberhasilan Ida Fauziyah memenangkan kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan pemilih luar negeri. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Fauziyah memperoleh 60.180 suara dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Keberhasilan tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji mengingat Dapil DKI Jakarta II merupakan salah satu daerah pemilihan dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi dan karakteristik pemilih yang heterogen. Selain harus menghadapi kandidat dari partai lain, Ida Fauziyah juga berkompetisi dalam ruang politik perkotaan yang ditandai oleh tingginya akses informasi, meningkatnya rasionalitas pemilih, dan kuatnya pengaruh media digital terhadap perilaku politik masyarakat.

Keberhasilan Ida Fauziyah tidak dapat dilepaskan dari modal politik yang dimilikinya sebagai mantan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia periode 2019-2024, anggota DPR RI lintas periode, serta kader perempuan yang memiliki basis sosial kuat di lingkungan

Nahdlatul Ulama (NU), khususnya Muslimat NU. Posisi tersebut memberikan kombinasi modal sosial, modal simbolik, dan modal politik yang relatif kuat dibandingkan kandidat lainnya. Dalam perspektif Bourdieu (1986), berbagai bentuk modal tersebut dapat dikonversi menjadi sumber kekuatan politik yang berpengaruh terhadap keberhasilan elektoral. Namun demikian, kepemilikan modal politik saja tidak cukup untuk menjelaskan kemenangan seorang kandidat. Yang lebih penting adalah bagaimana modal tersebut diorganisasikan dan dimobilisasi menjadi dukungan politik yang nyata melalui strategi yang tepat. Meskipun berbagai penelitian telah membahas strategi politik, mobilisasi elektoral, dan representasi perempuan dalam politik Indonesia, masih terdapat kesenjangan akademik yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian mengenai strategi politik cenderung berfokus pada kandidat laki-laki atau membahas fenomena personalisasi politik secara umum (Mietzner, 2020). Sementara itu, penelitian mengenai politik perempuan lebih banyak menyoroti persoalan afirmasi, hambatan struktural, dan keterwakilan perempuan di parlemen (Budiatri, 2015). Kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis strategi politik, mobilisasi sumber daya, dan representasi perempuan dalam konteks pemenangan kandidat perempuan di daerah pemilihan perkotaan yang kompetitif masih relatif terbatas.

Kajian mengenai strategi politik dalam pemilihan umum telah menjadi salah satu fokus penting dalam studi ilmu politik, terutama setelah berkembangnya sistem demokrasi elektoral yang semakin kompetitif. Dalam sistem pemilu modern, kemenangan kandidat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan partai politik, tetapi juga oleh kemampuan individu kandidat dalam membangun strategi yang mampu mengorganisasikan sumber daya politik, memobilisasi dukungan masyarakat, dan membangun hubungan yang efektif dengan pemilih. Perubahan sistem pemilu di Indonesia menjadi proporsional terbuka telah memperkuat fenomena tersebut, di mana kandidat menjadi aktor utama dalam kompetisi politik dan dituntut untuk mengembangkan strategi pemenangan yang semakin kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2010) menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia telah mendorong perubahan orientasi politik dari yang semula berpusat pada partai menuju kompetisi yang lebih berorientasi pada kandidat. Dalam sistem proporsional terbuka, kandidat harus mampu membangun basis dukungan personal melalui berbagai instrumen politik yang dimiliki. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perubahan sistem kepartaian dan belum menjelaskan secara spesifik bagaimana strategi politik kandidat dijalankan dalam konteks pemilihan legislatif.

Kajian mengenai perilaku pemilih yang dilakukan oleh Liddle & Mujani (2007) menemukan bahwa pilihan politik masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor identitas partai, afiliasi keagamaan, dan figur kandidat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa figur kandidat memiliki peran yang semakin penting dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih dan belum membahas secara mendalam strategi yang digunakan kandidat untuk membangun dukungan elektoral.

Dalam konteks personalisasi politik, Mietzner (2020) menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca reformasi menunjukkan kecenderungan menguatnya politik yang berpusat pada individu (*candidate-centered politics*). Menurutnya, keberhasilan kandidat dalam pemilu sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola modal politik, membangun citra publik, serta memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi politik menjadi elemen yang sangat penting dalam kompetisi elektoral modern. Akan tetapi, analisis Mietzner lebih banyak menyoroti fenomena personalisasi politik secara umum dan belum secara khusus mengkaji strategi kandidat perempuan dalam pemilu legislatif.

Kajian mengenai perempuan dan politik di Indonesia banyak dilakukan oleh Budiatri (2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi telah

meningkatkan jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti budaya patriarki, dominasi elit laki-laki dalam partai politik, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh regulasi afirmatif, tetapi juga oleh kemampuan mereka mengembangkan strategi politik yang efektif. Namun demikian, penelitian tersebut lebih banyak membahas hambatan politik perempuan dan belum secara spesifik mengkaji strategi pemenangan yang dilakukan kandidat perempuan dalam konteks daerah pemilihan perkotaan.

Penelitian Aspinall, Berenschot, Savirani & White (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat dalam pemilu Indonesia sangat dipengaruhi oleh kombinasi modal sosial, jaringan organisasi, sumber daya ekonomi, dan kemampuan membangun relasi dengan pemilih. Mereka menekankan bahwa keberhasilan elektoral tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan institusional, tetapi juga harus melihat bagaimana kandidat memanfaatkan sumber daya sosial yang dimiliki. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menyoroti dinamika politik elektoral secara umum dan belum menjelaskan hubungan antara strategi politik dan representasi perempuan.

Krook & Childs (2010) menjelaskan bahwa perempuan yang berhasil dalam kompetisi politik umumnya mengembangkan strategi yang berbeda dibandingkan kandidat laki-laki. Kandidat perempuan cenderung memanfaatkan jaringan komunitas, organisasi sosial, dan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan sebagai instrumen untuk membangun legitimasi politik. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat memperoleh dukungan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun representasi politik yang lebih inklusif. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan dalam konteks negara-negara demokrasi maju sehingga belum sepenuhnya relevan dengan karakteristik politik elektoral Indonesia yang masih dipengaruhi oleh faktor personalisasi dan patronase politik.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesenjangan akademik (*research gap*) yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai strategi politik masih berfokus pada kandidat secara umum dan belum banyak mengkaji strategi kandidat perempuan dalam pemilu legislatif. Kedua, penelitian mengenai perempuan dalam politik lebih banyak menyoroti isu keterwakilan dan hambatan struktural dibandingkan strategi pemenangan elektoral. Ketiga, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan strategi politik, mobilisasi sumber daya, dan representasi perempuan dalam satu kerangka analisis yang utuh, khususnya dalam konteks daerah pemilihan perkotaan yang kompetitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis secara mendalam strategi politik Ida Fauziyah dalam memenangkan Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II. Penelitian ini menggunakan perspektif strategi politik dan representasi politik perempuan untuk menjelaskan bagaimana berbagai sumber daya politik dimobilisasi serta bagaimana identitas dan representasi perempuan dikonstruksikan sebagai bagian dari strategi pemenangan elektoral. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian strategi politik dan representasi perempuan dalam demokrasi elektoral Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman empiris mengenai praktik politik perempuan dalam konteks kompetisi elektoral perkotaan yang semakin kompleks.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi politik yang digunakan Ida Fauziyah dalam memperoleh kemenangan elektoral serta menjelaskan peran mobilisasi sumber daya politik dan representasi perempuan dalam proses pemenangannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Strategi Politik

Strategi politik merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktor politik merancang dan melaksanakan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks pemilu, strategi politik berkaitan dengan proses pengorganisasian sumber daya, pengelolaan komunikasi politik, pembangunan citra publik, serta mobilisasi dukungan pemilih untuk memperoleh kemenangan elektoral.

Downs (1957) menjelaskan bahwa aktor politik bertindak secara rasional untuk memaksimalkan peluang kemenangan melalui penyesuaian posisi politik terhadap preferensi pemilih. Dalam perspektif rational choice, kandidat akan mengembangkan strategi yang dianggap paling efektif untuk memperoleh suara sebanyak mungkin. Oleh karena itu, strategi politik dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menghubungkan kepentingan kandidat dengan kebutuhan dan preferensi pemilih.

Norris (2000) menjelaskan bahwa dalam perkembangan demokrasi modern, politik semakin berorientasi pada kandidat (*candidate-centered politics*). Kekuatan partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu kemenangan. Sebaliknya, kemampuan kandidat membangun citra, reputasi, dan hubungan emosional dengan pemilih menjadi faktor yang semakin penting. Fenomena ini semakin menguat dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia.

Strategi politik juga dapat dijelaskan melalui konsep modal politik yang dikembangkan oleh Bourdieu (1986). Menurutny, terdapat empat bentuk modal yang dapat digunakan oleh aktor politik, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Modal ekonomi mencakup sumber daya material yang dapat digunakan dalam aktivitas politik. Modal sosial berkaitan dengan jaringan hubungan yang dimiliki kandidat. Modal kultural merujuk pada pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki. Sementara itu, modal simbolik berkaitan dengan reputasi, legitimasi, dan pengakuan sosial yang diterima oleh seorang aktor politik.

Dalam konteks penelitian ini, kemenangan Ida Fauziyah dianalisis melalui kemampuan mengelola berbagai bentuk modal tersebut menjadi sumber dukungan politik. Pengalaman sebagai anggota DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan dipahami sebagai modal simbolik dan modal kultural, sedangkan jaringan Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU diposisikan sebagai modal sosial yang berkontribusi terhadap keberhasilan elektoral.

2. Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*)

Teori Mobilisasi Sumber Daya yang dikembangkan oleh McCarthy & Zald (1977) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial maupun aktivitas politik sangat ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menghimpun dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa organisasi, jaringan sosial, relawan, dana kampanye, akses media, maupun legitimasi sosial. Dalam perspektif ini, kemenangan politik tidak hanya bergantung pada popularitas kandidat, tetapi juga pada efektivitas pengorganisasian sumber daya. Kandidat yang mampu memobilisasi sumber daya secara efektif memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi politik dibandingkan kandidat yang memiliki sumber daya besar tetapi tidak mampu mengelolanya.

Teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana Ida Fauziyah memanfaatkan struktur PKB, jaringan Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, relawan politik, dan berbagai komunitas sosial sebagai instrumen mobilisasi dukungan selama Pemilu 2024.

3. Representasi Politik Perempuan

Konsep representasi politik perempuan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Pitkin (1967) yang membedakan representasi ke dalam empat dimensi, yaitu representasi formal, deskriptif, simbolik, dan substantif. Representasi deskriptif merujuk pada kehadiran perempuan dalam lembaga politik sebagai wakil yang memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok yang diwakilinya. Representasi simbolik berkaitan dengan makna kehadiran perempuan sebagai simbol kesetaraan dan inklusivitas politik. Sementara itu, representasi substantif mengacu pada kemampuan perempuan memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan melalui kebijakan dan tindakan politik yang nyata.

Phillips (1995) melalui konsep *Politics of Presence* menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik penting karena pengalaman sosial perempuan menghasilkan perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan. Kehadiran perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mengenai kemampuan menghadirkan pengalaman dan kepentingan perempuan ke dalam proses politik.

Childs & Krook (2009), mengembangkan konsep *Critical Actors* yang menekankan bahwa representasi perempuan tidak ditentukan oleh banyaknya perempuan yang terpilih, melainkan oleh kemampuan mereka memperjuangkan agenda perempuan dalam arena politik. Dengan demikian, seorang politisi perempuan dapat menjadi representasi substantif apabila mampu mengartikulasikan kepentingan perempuan melalui tindakan politik yang nyata.

Teori representasi politik perempuan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Ida Fauziyah membangun legitimasi politik sebagai perempuan, sekaligus bagaimana identitas gender tersebut digunakan sebagai bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan elektoral di Dapil DKI Jakarta II.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, strategi, dan dinamika politik yang dilakukan Ida Fauziyah dalam memenangkan Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pengalaman, persepsi, serta tindakan para aktor politik secara komprehensif sehingga tidak hanya menjelaskan keberhasilan elektoral, tetapi juga memahami bagaimana strategi politik dirumuskan, diimplementasikan, dan dimaknai oleh para pihak yang terlibat (Creswell, 2014).

Penelitian menggunakan desain studi kasus karena berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu strategi politik Ida Fauziyah dalam Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Dapil DKI Jakarta II. Lokasi penelitian mencakup wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan pemilih luar negeri yang termasuk dalam Dapil DKI Jakarta II. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu daerah pemilihan dengan tingkat kompetisi politik yang tinggi, heterogenitas pemilih, akses informasi yang luas, serta dinamika partisipasi politik yang kompleks. Kondisi tersebut menjadikan Dapil DKI Jakarta II sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji efektivitas strategi politik dalam demokrasi elektoral modern. Penelitian dilaksanakan pada periode 2024–2026, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang terlibat langsung dalam proses kemenangan Ida Fauziyah pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, hasil Pemilu 2024, arsip kampanye, pemberitaan media massa, publikasi akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang

relevan. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan membangun pemahaman yang utuh sekaligus memperkuat proses triangulasi data.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Patton, 2002). Informan meliputi Ida Fauziyah sebagai informan utama, anggota tim kampanye, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), relawan politik, tokoh Nahdlatul Ulama, aktivis perempuan, serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang politik perempuan dan strategi elektoral. Selanjutnya, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan hingga mencapai *data saturation* atau kejenuhan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai proses perumusan strategi politik, mobilisasi sumber daya, pemanfaatan jaringan organisasi, strategi komunikasi politik, serta penguatan representasi perempuan dalam kampanye politik Ida Fauziyah. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi hasil wawancara melalui analisis dokumen resmi, materi kampanye, dokumen internal tim pemenangan, publikasi media massa, konten media sosial, foto kegiatan kampanye, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas politik kandidat. Analisis dokumen menjadi penting karena mampu memberikan informasi yang bersifat objektif dan historis mengenai proses politik yang diteliti (Bowen, 2009). Sementara itu, observasi dilakukan secara terbatas untuk memahami konteks sosial-politik, pola interaksi antara kandidat, tim kampanye, relawan, dan masyarakat, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilisasi politik yang tidak seluruhnya dapat diungkap melalui wawancara.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokan, dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan temuan. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan kerangka teori yang digunakan sehingga diperoleh kesimpulan yang valid, konsisten, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan verifikasi temuan secara berkelanjutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Politik dan Karakteristik Daerah Pemilihan Jakarta II

Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II berlangsung dalam konteks kompetisi elektoral yang sangat dinamis. Dapil ini meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan pemilih luar negeri yang memiliki karakteristik sosial-politik berbeda dibandingkan banyak daerah pemilihan lain di Indonesia. Sebagai wilayah metropolitan, Jakarta II merupakan ruang politik yang ditandai oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, heterogenitas sosial yang kompleks, serta akses informasi yang luas. Kondisi tersebut membentuk karakter pemilih yang relatif rasional, kritis, dan tidak mudah dipengaruhi oleh mobilisasi politik tradisional berbasis patronase semata.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, kandidat dituntut untuk membangun basis dukungan personal karena kompetisi tidak hanya terjadi antarpolisi tetapi juga antarkandidat dalam partai yang sama. Carey & Shugart (1995) menjelaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka mendorong berkembangnya *personal vote seeking*, yaitu upaya kandidat membangun dukungan berbasis figur dan reputasi individu. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam kontestasi DPR RI Dapil Jakarta II yang diikuti oleh sejumlah figur nasional dengan tingkat popularitas dan sumber daya politik yang relatif kuat.

Kompetisi politik di Dapil Jakarta II juga dipengaruhi oleh tingginya penetrasi media digital. Kampanye politik tidak lagi berlangsung secara konvensional melalui rapat umum dan pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui media sosial yang memungkinkan kandidat membangun hubungan langsung dengan pemilih. Chadwick (2017) menyebut fenomena ini sebagai hybrid media system, yaitu integrasi antara media konvensional dan media digital dalam membentuk opini publik. Dalam konteks ini, kandidat yang mampu mengelola komunikasi digital secara efektif memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan politiknya.

Karakteristik Pemilih Jakarta II menunjukkan kecenderungan yang lebih pragmatis dan berbasis evaluasi kinerja. Liddle dan Mujani (2007) menjelaskan bahwa perilaku memilih masyarakat perkotaan semakin dipengaruhi oleh faktor kapasitas kandidat, rekam jejak, dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, strategi kampanye yang hanya mengandalkan identitas politik atau afiliasi partai tidak lagi cukup untuk memperoleh dukungan elektoral yang signifikan.

Dalam konteks tersebut, Ida Fauziyah menghadapi tantangan politik yang cukup kompleks. Sebagai kandidat perempuan dari PKB, ia harus bersaing dengan figur-figur nasional yang memiliki tingkat popularitas tinggi sekaligus menghadapi karakter pemilih urban yang kritis terhadap performa politik. Oleh karena itu, strategi yang dibangun tidak hanya berorientasi pada mobilisasi suara, tetapi juga pada pembangunan legitimasi politik yang berbasis pengalaman, kapasitas, dan representasi sosial.

2. Perumusan dan Desain Strategi Politik Ida Fauziyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik Ida Fauziyah disusun melalui proses perencanaan yang sistematis dengan mempertimbangkan kondisi politik, karakteristik pemilih, dan sumber daya yang dimiliki. Strategi tersebut tidak dibangun secara reaktif selama masa kampanye, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam perspektif Downs (1957), strategi politik merupakan tindakan rasional yang dilakukan kandidat untuk memaksimalkan peluang kemenangan. Rasionalitas politik tersebut tercermin dari kemampuan kandidat membaca kebutuhan pemilih dan menyesuaikan pesan politik yang disampaikan. Dalam kasus Ida Fauziyah, strategi yang dibangun berangkat dari asumsi bahwa pemilih Jakarta II lebih menghargai kompetensi dan rekam jejak dibandingkan mobilisasi berbasis identitas. Posisi Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia periode 2019–2024 menjadi aset politik yang sangat penting. Pengalaman tersebut digunakan sebagai fondasi utama dalam membangun narasi kampanye. Tim pemenangan secara konsisten menampilkan Ida Fauziyah sebagai figur yang memiliki pengalaman birokrasi, kemampuan manajerial, serta kapasitas dalam menghasilkan kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa desain strategi politik Ida Fauziyah dibangun melalui tiga dimensi utama. Pertama, penguatan legitimasi politik melalui rekam jejak. Kedua, mobilisasi jaringan organisasi sosial dan keagamaan. Ketiga, penguatan komunikasi politik yang berbasis isu publik. Ketiga dimensi tersebut saling terintegrasi sehingga menghasilkan strategi yang relatif adaptif terhadap kondisi politik Dapil Jakarta II.

3. Diferensiasi Politik sebagai Strategi Elektoral

Salah satu strategi yang paling menonjol dalam kampanye Ida Fauziyah adalah diferensiasi politik. Strategi ini dilakukan untuk membedakan dirinya dari kandidat lain yang memiliki sumber daya politik serupa. Dalam teori pemasaran politik (political marketing), diferensiasi merupakan upaya membangun posisi unik di benak pemilih (Newman, 1999). Kandidat harus memiliki identitas yang membedakannya dari pesaing agar mampu menarik

perhatian pemilih. Dalam kasus Ida Fauziyah, diferensiasi dibangun melalui kombinasi pengalaman politik, identitas perempuan, dan kedekatan dengan organisasi keagamaan.

Berbeda dengan sebagian kandidat yang lebih menonjolkan popularitas atau figur publik, Ida Fauziyah membangun citra sebagai politisi profesional yang memiliki pengalaman panjang dalam legislatif maupun eksekutif. Pengalaman sebagai Menteri Ketenagakerjaan menjadi instrumen utama untuk memperkuat persepsi kompetensi. Narasi yang dibangun tidak berfokus pada pencitraan personal semata, tetapi pada kemampuan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa pengalaman politik dapat dikategorikan sebagai modal simbolik yang mampu menghasilkan legitimasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman politik Ida Fauziyah dikonversi menjadi sumber kepercayaan publik yang memperkuat posisi elektoralnya. Modal simbolik tersebut kemudian dipadukan dengan modal sosial yang berasal dari jaringan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU. Strategi diferensiasi ini menjadi penting karena pemilih urban cenderung melakukan evaluasi terhadap kualitas kandidat. Oleh karena itu, keberhasilan Ida Fauziyah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh keberhasilannya membangun persepsi sebagai figur yang kompeten dan berpengalaman.

4. Mobilisasi Struktur Partai dan Jaringan Organisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa berperan sebagai basis struktural dalam proses mobilisasi politik. Struktur partai digunakan sebagai sarana koordinasi, distribusi informasi, dan pengorganisasian aktivitas kampanye di tingkat lokal. Namun demikian, kekuatan utama strategi mobilisasi tidak hanya berasal dari partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan organisasi keagamaan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam proses kemenangan. Keterlibatan Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, Fatayat NU, serta berbagai komunitas berbasis keagamaan menjadi instrumen penting dalam membangun dukungan politik.

McCarthy & Zald (1977) menjelaskan bahwa keberhasilan mobilisasi politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor dalam mengelola sumber daya organisasi. Dalam kasus Ida Fauziyah, jaringan organisasi berfungsi sebagai sumber daya yang memungkinkan distribusi informasi politik berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai instrumen mobilisasi, jaringan organisasi juga menjadi sumber legitimasi sosial. Kepercayaan yang telah terbentuk dalam organisasi keagamaan memudahkan proses transfer dukungan politik kepada kandidat. Dengan demikian, jaringan organisasi tidak hanya menghasilkan mobilisasi suara, tetapi juga menciptakan hubungan politik yang lebih kuat antara kandidat dan masyarakat.

Strategi Mobilisasi Pemilih Urban Karakteristik pemilih urban mengharuskan kandidat mengembangkan pendekatan kampanye yang berbeda dibandingkan wilayah non-perkotaan. Pemilih perkotaan cenderung memiliki akses informasi yang luas sehingga lebih kritis dalam mengevaluasi kandidat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mobilisasi Ida Fauziyah diarahkan pada pendekatan berbasis isu. Kampanye lebih banyak menyoroti persoalan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Pemilihan isu tersebut bukan hanya karena relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga karena sesuai dengan rekam jejak politik Ida Fauziyah.

Strategi ini menunjukkan adanya upaya membangun hubungan programatik antara kandidat dan pemilih. Kitschelt (2000) menjelaskan bahwa hubungan programatik terjadi ketika dukungan politik dibangun berdasarkan program dan kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemilih tidak hanya melihat kandidat sebagai figur politik, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki solusi terhadap berbagai persoalan publik.

5. Representasi Politik Perempuan dalam Strategi Pemenangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi politik perempuan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi kemenangan Ida Fauziyah. Namun representasi tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk simbolik, melainkan juga diwujudkan melalui agenda politik yang substantif.

Menurut Pitkin (1967), representasi perempuan terdiri atas dimensi deskriptif, simbolik, dan substantif. Secara deskriptif, Ida Fauziyah menghadirkan figur perempuan yang berhasil menempati posisi strategis dalam politik nasional. Kehadiran tersebut memiliki makna simbolik karena menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dalam arena politik yang selama ini didominasi laki-laki.

Lebih jauh, representasi substantif terlihat dari berbagai isu yang diangkat selama kampanye, seperti perlindungan pekerja perempuan, penguatan ekonomi keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, identitas perempuan tidak hanya menjadi instrumen elektoral tetapi juga menjadi bagian dari agenda politik yang diperjuangkan.

Temuan ini memperkuat konsep critical actors dari Childs & Krook (2009). Keberhasilan representasi perempuan tidak ditentukan oleh jumlah perempuan yang terpilih, tetapi oleh kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui tindakan politik yang nyata. Dalam konteks tersebut, Ida Fauziyah tidak hanya merepresentasikan perempuan secara simbolik, tetapi juga secara substantif melalui pengalaman dan agenda kebijakan yang dimilikinya. Kemenangan Ida Fauziyah merupakan hasil integrasi antara strategi politik yang terencana dengan konstruksi representasi perempuan yang efektif. Mobilisasi sumber daya politik, penguatan jaringan organisasi, diferensiasi politik, komunikasi berbasis isu, dan representasi perempuan saling berinteraksi dalam menghasilkan dukungan elektoral.

Dalam perspektif strategi politik, kemenangan diperoleh melalui kemampuan mengelola modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik yang dimiliki kandidat (Bourdieu, 1986). Sementara itu, dalam perspektif representasi politik perempuan, kemenangan diperkuat oleh kemampuan kandidat membangun legitimasi melalui identitas gender dan agenda kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat perempuan dalam pemilu tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor personal atau organisasi semata. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kombinasi antara mobilisasi politik yang efektif dan representasi perempuan yang mampu diterjemahkan menjadi sumber legitimasi elektoral. Temuan ini sekaligus memperkaya kajian mengenai strategi politik perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemenangan Ida Fauziyah dalam Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Dapil DKI Jakarta II merupakan hasil dari strategi politik yang terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan karakteristik pemilih perkotaan. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditopang oleh dukungan struktural Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi juga oleh kemampuan mengoptimalkan modal politik, modal sosial, dan modal simbolik melalui diferensiasi politik, mobilisasi jaringan, komunikasi politik berbasis isu, serta penguatan representasi perempuan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekam jejak kepemimpinan dan pengalaman sebagai Menteri Ketenagakerjaan menjadi sumber legitimasi yang memperkuat kepercayaan publik, sementara sinergi antara struktur partai, jaringan Nahdlatul Ulama, dan organisasi perempuan memperluas basis dukungan politik. Di sisi lain, kombinasi komunikasi tatap muka dan media digital memungkinkan penyampaian pesan politik yang lebih efektif kepada pemilih perkotaan yang rasional dan kritis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan

bahwa keberhasilan elektoral di wilayah perkotaan ditentukan oleh kemampuan kandidat mengintegrasikan sumber daya politik, sosial, dan komunikasi ke dalam strategi yang adaptif, berbasis isu, serta mampu membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Budiatri, A. P. (2015). *Perempuan dan politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carey, J. M., & Shugart, M. S. (1995). Incentives to cultivate a personal vote: A rank ordering of electoral formulas. *Electoral Studies*, 14(4), 417–439. [https://doi.org/10.1016/0261-3794\(94\)00035-2](https://doi.org/10.1016/0261-3794(94)00035-2)
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
- Childs, S., & Krook, M. L. (2009). Analysing women's substantive representation: From critical mass to critical actors. *Government and Opposition*, 44(2), 125–145. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper and Row.
- Kitschelt, H. (2000). Linkages between citizens and politicians in democratic polities. *Comparative Political Studies*, 33(6–7), 845–879. <https://doi.org/10.1177/001041400003300607>
- Krook, M. L. (2010). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
- Krook, M. L., & Childs, S. (2010). *Women, gender and politics: A reader*. Oxford University Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Inter Views: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Sage Publications.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857. <https://doi.org/10.1177/0010414006292113>
- Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent “yes”. *The Journal of Politics*, 61(3), 628–657. <https://doi.org/10.2307/2647821>
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge University Press.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241. <https://doi.org/10.1086/226464>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

- Mietzner, M. (2020). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post- Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Newman, B. I. (1999). *The mass marketing of politics: Democracy in an age of manufactured images*. Sage Publications.
- Norris, P. (2000). *A virtuous circle: Political communications in postindustrial societies*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement: Social movements and contentious politics*. Cambridge University Press.
- Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024*. KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Hasil rekapitulasi nasional Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2024*. KPU RI.